



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Jalan Jenderal Sudirman Telepon 0511-4799600 Faksimile 0511-7999599
MARABAHAN 75011

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR : 050/017.1/DPMPTSP/2020

TENTANG

**HASIL REVIU KETIGA SURAT KEPUTUSAN BUPATI BARITO
KUALA NOMOR 188.45/243/KUM/2018 TENTANG PENETAPAN
RENCANA STRATEGIS 2017-2022 DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO KUALA**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU
KABUPATEN BARITO KUALA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lebih efisien dan efektif telah dilaksanakan perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan ditindaklanjuti dengan reviu terhadap beberapa sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator kinerja SKPD melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 050/ 010 /DPMPTSP/2020 tentang Penetapan Pohon Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020 sehingga memenuhi kriteria sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator kinerja yang lebih baik guna mendukung tercapainya visi misi Pemerintah Daerah
- b. Bahwa untuk menyikapi masih berkembangnya penyebaran Covid-19 di Kabupaten Barito Kuala sampai batas waktu yang tidak tertentu dan berdampak terhadap kinerja sehingga perlu menetapkan kembali target Indikator Kinerja Utama dan target kinerja lainnya
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, perlu menyelaraskannya dan melakukan koreksi/perbaikan melalui reviu ketiga terhadap Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/243/KUM/2018 tentang Penetapan Rencana Strategis 2017-2022 Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Barito Kuala tentang Hasil Reviu Ketiga Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/243/KUM/2018 tentang Penetapan Rencana Strategis 2017-2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3851)
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355)
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4389)
5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4410)
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421)
7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4844)
8. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126 tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438)
9. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33 tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4700)

10. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 68 tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan instansi vertikal di daerah (lembaran negara tahun 1988 nomor 10, tambahan lembaran negara nomor 3373)
11. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Otonomi Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran negara tahun 2005 nomor 140, tambahan lembaran negara nomor 4598)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (lembaran negara tahun 2006 nomor 96, tambahan lembaran negara nomor 4663)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (lembaran negara tahun 2007 nomor 82, tambahan lembaran negara nomor 4737)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran negara tahun 2008 nomor 19, tambahan lembaran negara nomor 4815)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (lembaran negara tahun 2008 nomor 20, tambahan lembaran negara nomor 4816)
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah (lembaran negara tahun 2008 nomor 21, tambahan lembaran negara nomor 4817)
19. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
21. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor 28 Tahun 2010, nomor 0199/M PPN/04/2010, nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN)
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah

23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 – 2014
24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005 – 2025
25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 19 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala (lembaran Daerah Nomor Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007 nomor 19)
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 35 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas.
27. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022
28. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas-Dinas (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala tahun 2019 Nomor 46)
29. Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/243/KUM/2018 tentang Penetapan Rencana Strategis 2017 – 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala.
30. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan Nomor. 188.4/02/KLHS/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022.
31. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor. : 050/ 010 /DPMPTSP/2020 tentang Penetapan Pohon Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020

Memperhatikan : Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Target Capaian Indikator Kinerja Utama dan Capaian Kinerja Kegiatan

KEDUA : Perubahan beberapa indikator sasaran , sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator kinerja (esselon III dan IV) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Barito Kuala.

- KETIGA : Seluruh materi Hasil Reviu Ketiga Rencana Strategis 2017-2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala tertuang dalam Suplemen Renstra 2017-2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal 5 Juni 2020

Kepala Dinas,

Ir. H. MUHAMMAD ABERAR, MP
NIP. 19631127 199203 1 006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 050/017.1/DPMPTSP/2020
TANGGAL 5 JUNI 2020
TENTANG
HASIL REVIU KETIGA SURAT KEPUTUSAN BUPATI
BARITO KUALA NOMOR 188.45/243/KUM/2018
TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS 2017-
2022 DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
BARITO KUALA

**REVIU III RENSTRA 2017-2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

BUTIR-BUTIR REVIU KETIGA RENSTRA 2017-2020 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

BAB I : Tidak ada perubahan

BAB II:

Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala

BAB III : Tidak ada perubahan

BAB IV :

1. Tabel. 4.1.2.1 (T.C.25.A) Target Capaian Kinerja Kegiatan, terlampir
2. Tabel 4.1.2.2.Beberapa Sasaran Program, Indikator Program dan Target Capaian Kinerja Program (Matrik Reviu Ketiga RENSTRA Tahun 2020, terlampir)
3. Tabel 4.1.2.3 Beberapa Indikator Sasaran, Sasaran Program, Indikator Program, Sasaran Kegiatan, Indikator Kegiatan Target Capaian Kinerja Kegiatan (Matrik Reviu Ketiga RENSTRA Tahun 2020 terlampir)

BAB V : Tidak ada perubahan

BAB VI : Tidak Ada Perubahan

BAB VII :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (terlampir)

BAB VIII :

BAB Penutup tidak ada perbaikan



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

**Jalan Jenderal Sudirman No. Telp. 0511 4799600 Fax 0511
4799599 Marabahan KP 75011**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO KUALA**

NOMOR : 050/017.1/DPMPTSP/2020

TENTANG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
REVIU KETIGA RENCANA STRATEGIS 2017-2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU
KABUPATEN BARITO KUALA**

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Ketua Tim : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Tim Pelaksana : 1. Kepala Bidang Penanaman Modal
2. Kepala Bidang Pengendalian
3. Kepala Bidang Perizinan Umum
5. Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset
6. Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal 5 Juni 2020

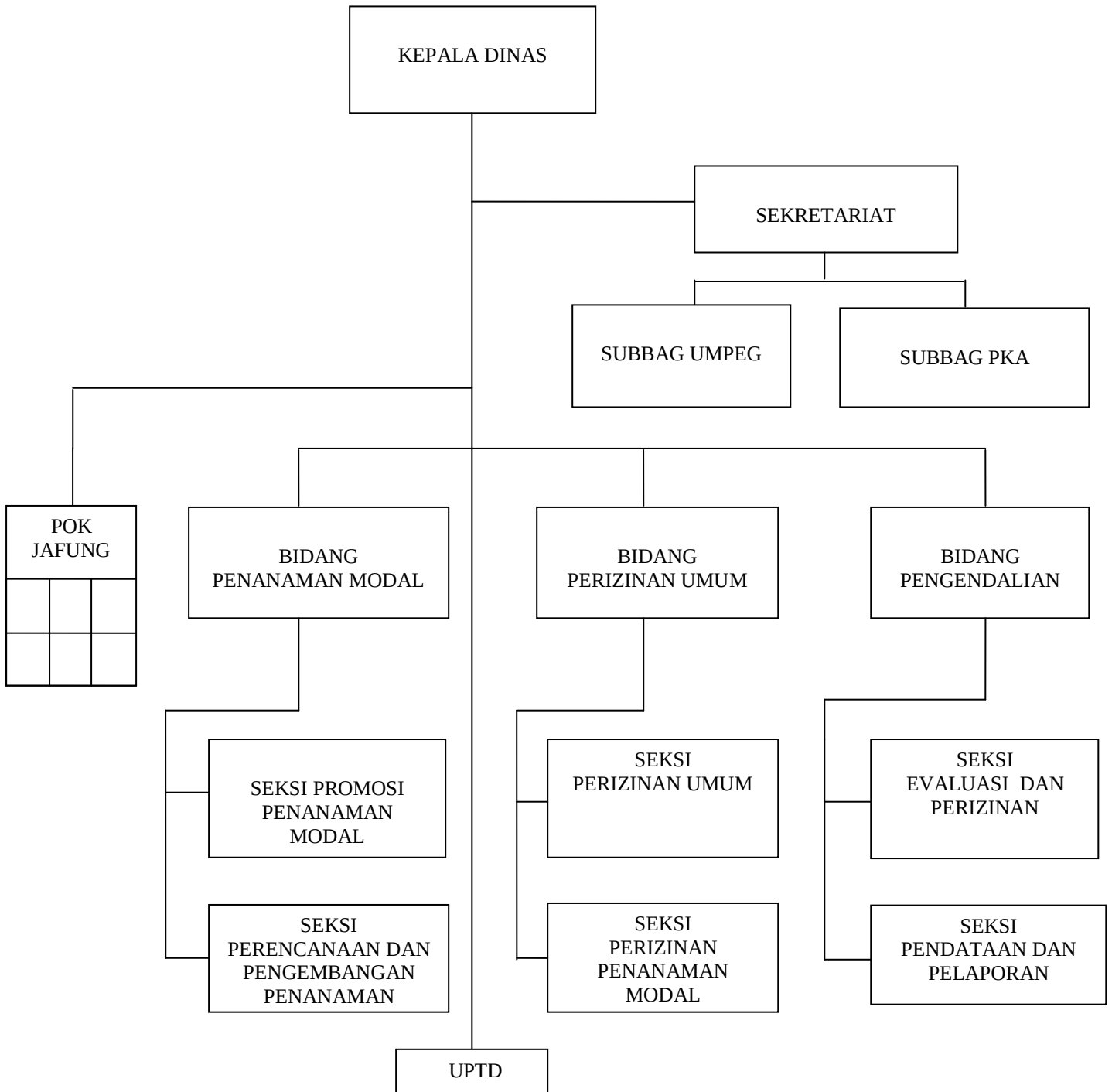
Kepala Dinas,

Ir. H. MUHAMMAD ABERAR, MP
NIP. 19631127 199203 1 006

BAB II

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN BARITO KUALA

Perda Kabupaten Barito Kuala
Nomor : 46 tahun 2019
Tanggal : 16 September 2020



BAB IV

TABEL 4. 1.2.1 (T.C.25.A)

TARGET CAPAIAN KINERJA KEGIATAN

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Barito Kuala 2017-2022

VISI : "Terwujudnya Pelayanan Perizinan Setara (Sederhana, Transparan dan Akurat)"									
MISI ke-1 : Peningkatan Pelayanan, Kemudahan, Transparan dalam Investasi dan Perizinan									
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	T a r g e t				
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan Investasi Daerah (PMDN/PMA)	Nilai Investasi Daerah (PMDN/PMA)	Meningkatnya Investasi Daerah (PMDN/PMA)	Nilai Investasi Daerah Milyar)	4.912.757.286.736	5 M	500 M	250 M	250 M	250 M
Meningkatkan Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,66	83,66	84	84,75	84,99	84,99

TABEL 4.1.2.2(T.C.25.B)
TARGET CAPAIAN KINERJA KEGIATAN

Visi, Misi, Tujun dan Sasaran Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Barito Kuala 2017-2022

VISI : "Terwujudnya Pelayanan Perizinan Setara (Sederhana, Transparan dan Akurat)"											
MISI ke-1 : Peningkatan Pelayanan, Kemudahan, Transparan dalam Investasi dan Perizinan											
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Sasaran Program	Indikator Program	Kondisi Awal	T a r g e t				
						2017	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan Investasi Daerah (PMDN/PMA)	Nilai Investasi Daerah (PMDN/PMA)	Meningkatnya Investasi Daerah (PMDN/PMA)	Nilai Investasi Daerah (PMDN/PMA)	Meningkatnya investor yang berinvestasi	Persentase peingkatan investor	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Meningkatnya perizinan PM yang terbit tepatwaktu	Persentase perizinan PM yang di terbitkan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Meningkatkan Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya kualitas pengndalian perizinan umum dan perizinan PM	Persentase penurunan pelanggaran perizinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Meningkatnya pelayanan perizinan umum dan non perizinan	Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%

TABEL 4.1.2.3 (T.C.25.C)

TARGET CAPAIAN KINERJA KEGIATAN

Visi, Misi, Tujun dan Sasaran Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Barito Kuala 2017-2022

VISI : "Terwujudnya Pelayanan Perizinan Setara (Sederhana, Transparan dan Akurat)"												
MISI ke-1 : Peningkatan Pelayanan, Kemudahan, Transparan dalam Investasi dan Perizinan												
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Sasaran Program	Indikator Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kondisi Awal	T a r g e t				
							2017	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan Investasi Daerah (PMDN/PMA)	Meningkatnya Investasi Daerah (PMDN/PM A)	Nilai Investasi Daerah (Milyar)	Meningkatnya investor yang berinvestasi	Persentase peningkatan investor	Meningkatnya kegiatan pengawasan PM	Jumlah laporan nilai investasi (laporan)	10	12	14	16	18	20
						Jumlah investor yang merealisasikan rencana investasi (perusahaan)	14	14	14	14	15	17
					Tersusunnya dokumen perencanaan PM	Jumlah dokumen perencanaan PM	0	0	1	1	1	1
					Terlaksananya pameran investasi / promosi daerah	Jumlah kerjasama investasi (dokumen)	0	1	2	2	2	2

					Terlaksananya monitoring perizinan dan laporan PM	Jumlah perusahaan yang termonitor (PM)	14	16	18	20	22	24
				Persentase perizinan PM yang diterbitkan tepat waktu	Meningkatnya penerbitan izin PM	Jumlah ipendamping a izin PM yang di terbitkan (berkas)	17	17	17	17	17	17
Meningkatkan Pelayanan Perizinan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya kualitas pengendalian perizinan umum dan perizinan PM	Persentase penurunan pelanggaran perizinan	Terlaksananya monitoring perizinan	Jumlah pelaku usaha yang taat aturan (non PM)	12	12	12	12	12	12
					Terlaksananya survey IKM	Jumlah responden yang disurvey (orang)	384	384	384	384	384	384
					Terlaksananya pendataan perizinan	Jumlah pelaku usaha terdata (pelaku usaha)	600	600	600	600	600	600

				Persentase perizinn yang diterbitkan tepat waktu	Terlaksana nya sosialisasi perizinan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan (kali)	17	17	17	17	17	17
					Terlaksana nya survey lapangan permohonan perizinan	Jumlah izin yang diterbitkan (berkas)	4090	4000	2000	600	600	600

BAB VII :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	
1	Nilai Investasi Daerah (PMDN/PMA)	4.912.757.286.736	5 M	500 M	250 M	250 M	250 M	1.255.000.000.000
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,66	83,66	84	84,75	84,99	84,99	84,99
3	Persentase Peningkatan Investor	20 investor (%)	10 (2)	10 (2)	10 (2)	10 (2)	10 (2)	50 % (10)
4	Persentase Perizinan PM Yang Diterbitkan Tepat Waktu	100%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perizinan	100%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Perizinan Umum dan Non Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu	100%	100	100	100	100	100	100
7	Jumlah Investor Yang Merealisasikan Rencana Investasi (perusahaan)	14 perusahaan	0	0	14	15	17	17
8	Jumlah Dokumen Perencanaan PM	0 dokumen	0	1	1	1	1	4
9	Jumlah Kerjasama Investasi	0	1 (4 x)	2 (5x)	2	2	2	9

10	Jumlah Perusahaan Yang Termonitor (PM)	14	16 (+2) (1 dok)	18(+2) (1 dok)	20(+2) (1dok)	22(+2)	24(+2)	24(+10)
11	Jumlah Pendampingan Izin PM yang diterbitkan	17 kali	17	17	17	17	17	85
12	Jumlah Pelaku Usaha Yang Taat Aturan (Non PM)	12	12	12	12	12	12	60
13	Jumlah Responden Yang Disurvey	384 orang	384 (1 dok)	384 (1 dok)	384 (1 dok)	500 (1 dok)	500 (1 dok)	2152
14	Jumlah Perizinan Yang Terdata	3500 izin	3000	1500	600	600	600	6300
15	Jumlah Sosialisasi Yang Dilaksanakan	17 kali	17	17	17	17	17	85
17	Jumlah Izin Yang Diterbitkan (berkas)	4090	4000	2000	600	600	600	7800